

**LEGISLATION AND
CASE LAW
AT THE LIBRARY OF THE VVI**



2005-2007

W 00 Legislation in general

Indeks tambahan berita negara Republik Indonesia (perseroan-perseroan terbatas) 1946 - 1978, meliputi naamloze vennootschappen yang termuat dalam bijvoegsel der Javasche Courant 1946 s/d 1949 / Pusat Dokumentasi Hukum , Fakultas Hukum , Universitas Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan , Departemen Kehakiman. - Jakarta : Pusat, 1980. – JURBIB OVZEER 910 W-00

Abstrak surat petunjuk Mahkamah Agung RI tahun 1951-1993. - [Jakarta] : Mahkamah Agung, 1997. – JURBIB OVZEER 910 W-00

Himpunan beranotasi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 1960-2001 / disusun oleh Tim Redaksi Tatanusa, Suradji, S.H. & Pularjono. - Jakarta : Tatanusa, 2001. – JURBIB OVZEER 910 W-00

Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang benda cagar budaya / Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. - [Jakarta] : Departemen tsb., 2001. – JURBIB OVZEER 910 W-00

Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia – 2006 – jilid 1 / [penyusunan Tim Redaksi CV. Citra Mandiri]. - Jakarta : Citra Mandiri, [2006-...].- JURBIB OVZEER W-00

UU R.I nomor 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (Propenas) tahun 2000-2004 – [S.I.] : Mini Jaya Abadi, [2001]. – JURBIB OVZEER 910 –W-00

Daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan tahun 1995 sampai dengan 2001 / [Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) , Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia]. - [Jakarta] : Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, [2002]. – JURBIB OVZEER 910 W-00

4 (empat) UU RI nomor 22 tahun 2002 grasi; nomor 24 tahun 2002 surat utang Negara; nomor 18 tahun 2002 sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; nomor 16 tahun 2001 yayasan / pimpinan: H. Nursyahud. – Jakarta : Panca Usaha, 2002. – JURBIB OVZEER 910 W-00

Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2002, dilengkapi: perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 / Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). - Jakarta : Cipta Jaya, 2002. – JURBIB OVZEER 910 W-00

Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil sidang tahunan MPR RI 2002. - Jakarta : Eko Jaya, 2002. – JURBIB OVZEER 910 W-00

Katalog kumpulan Undang-undang pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1945 s/d tahun 2003 dengan status/aspek legalitasnya / [dihimpun oleh] Sekretariat Departemen Dalam Negeri. - [Jakarta] : Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia, [2003]. – JURBIB OVZEER 910 W-00

Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. 2003, Jil. II / [penyusunan Tim Redaksi CV. Citra Mandiri]. - Jakarta : Citra Mandiri, 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-00

Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia 2003, JJil. III / [penyusunan Tim Redaksi CV. Citra Mandiri]. - Jakarta : Citra Mandiri, 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-00

Himpunan ketetapan MPRS dan ketetapan MPR RI berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Republik Indonesia nomor I/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Republik Indonesia tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 dan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Republik Indonesia tahun 2003. - [Jakarta] : Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-00

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam melaksanakan demokrasi : laporan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPR RI pada

sidang tahunan MPR RI tahun keempat 2002-2003. - [Jakarta] : Dewan Perwakilan Rakyat, Republik Indonesia, 2003. - JURBIB OVZEER 910 W-00

Himpunan Undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, periode 1999-2004, tahun keempat, Bagian I / Sekretariat Jenderal, Dewan Perwakilan Rakyat. - Jakarta : Sekretariat tsb., 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-00

Himpunan Undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, periode 1999-2004, tahun keempat, Bagian II / Sekretariat Jenderal, Dewan Perwakilan Rakyat. - Jakarta : Sekretariat tsb., 2003. JURBIB OVZEER 910 W-00

Kumpulan undang-undang dan peraturan pemerintah Republik Indonesia. – 3 vols. – [Jakarta] : Medya Duta, 2003-2004. – JURBIB OVZEER 910 W-00

Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. (Jilid 2004, I) / [penyusunan Tim Redaksi CV. Citra Mandiri]. - Jakarta : Citra Mandiri, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-00

Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tahun 2004-1 / [penerb./penghimpun]: Eko Jaya, 2004. - Jakarta : Eko Jaya, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-00

Himpunan peraturan perundang-undangan departemen dalam negeri Tahun 2004. – Jakarta Pusat : Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Departemen Dalam Negeri, [2004]. - JURBIB OVZEER 910 W-00

Seri Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia ... / [penyusun: tim redaksi Wikrama Waskhita]. - Th. 2004 –I, II, III, IV. - [Jakarta] : Wikrama Waskhita, 2004 – JURBIB OVZEER 910 W-00

Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia / Tim Redaksi CV. Citra Mandiri, 2005. - Jil. 2005-I. - Jakarta : Citra Mandiri, 2005 - JURBIB OVZEER 910 W-00

Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tahun 2004, no. 2, 3, 4 / [penerb./penghimpun]: Eko Jaya, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-00

Kitab Undang-Undang Lembaga Hukum dan Politik / dikodifikasi oleh: C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil. - Jakarta : Pradnya Paramita, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-00

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. - Jakarta : Eko Jaya, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-00

Undang-Undang R.I. nomor 25 & 10 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. - Jakarta : Cipta Jaya, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-00

Katalog undang-undang pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1945 s.d. 2004 dengan status/aspek legalitas / Departemen Dalam Negeri. - [Jakarta] : Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-00

Katalog peraturan pemerintah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1945 s.d. 2004 dengan status/aspek legalitasnya / [dihimpun oleh] Departemen Dalam Negeri. - [Jakarta] : Departemen Dalam Negeri, Republik Indonesia, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-00

Seri Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia ... / [penyusun: tim redaksi Wikrama Waskhita]. Th. 2004, bagian I, jil. 3. - [Jakarta] : Wikrama Waskhita, 2005. JURBIB OVZEER 910 W-00

Seri Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia ... / [penyusun: tim redaksi Wikrama Waskhita]. - Th. 2005, bagian I,. - [Jakarta] : Wikrama Waskhita, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-00

Himpunan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa. - Jakarta : Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2005. - JURBIB OVZEER 910 W-00

Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sorotan : Undang-Undang no. 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan : dilengkapi dengan analisa kritis / Jazim Hamidi, Budiman N.P.D. Sinaga- Jakarta : Tatanusa, 2005.- JURBIB OVZEER 910 W-00

Seri Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia ... / [penyusun: tim redaksi Wikrama Waskhita]. - Th. 2005 (Bagian II). - [Jakarta] : Wikrama Waskhita, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-00

Seri Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia ... / [penyusun: tim redaksi Wikrama Waskhita]. - Th. 2005 (Bagian Iii). - [Jakarta] : Wikrama Waskhita, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-00

Himpunan surat edaran dan peraturan Mahkamah Agung, Republik Indonesia, 1951-2005. - Jakarta : Citra Mandiri, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-00

Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tahun 2006-I / [penerb./penghimpun]: Eko Jaya. - Jakarta : Eko Jaya, 2006. – JURBIB OVZEER W-00

Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tahun 2006-II / [penerb./penghimpun]: Eko Jaya.- Jakarta : Eko Jaya, 2006. – JURBIB OVZEER W-00

Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2006 (kwartal pertama) / Sumaryo Budi R.. – Edisi Undang-Undang Jilid 1. – Jakarta : CV. Citra Utama, 2006. – JURBIB OVZEER 910 W-00

Seri Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia 2006 (Bagian IV), Jilid 2. / [penyusun: tim redaksi Wikrama Waskhita]. - Th. 1985-1992 (1993) - - [Jakarta] : Wikrama Waskhita, 2007. – JURBIB OVZEER 910 W-00

Peraturan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional : tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan (pp. nomor 39 tahun 2006) & tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional (pp. nomor 40 tahun 2006).- Jakarta : CV. Eko Jaya, 2006. - JURBIB OVZEER 910 W-00

Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia / [penyusunan Tim Redaksi CV. Citra Mandiri]. - Jakarta : Citra Mandiri, [2006--II]. – JURBIB OVZEER 910 W-00

Seri Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia 2006-II. / [penyusun: tim redaksi Wikrama Waskhita]. - [Jakarta] : Wikrama Waskhita, 2006- JURBIB OVZEER 910 W-00

Seri Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia- 2006-III. / [penyusun: tim redaksi Wikrama Waskhita]. - [Jakarta] : Wikrama Waskhita, 2006- JURBIB OVZEER 910 W-00

Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025. – Jakarta : CV. Eko Jaya, 2007. - JURBIB OVZEER 910 W-00

Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025. – Jakarta : CV. Eko Jaya, 2007. - JURBIB OVZEER 910 W-00

W 01 Constitutions, Basic rights, Human rights

Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 / Lembaga Informasi Nasional. - Jakarta : Lembaga tsb., 2002. – JURBIB OVZEER 910 W-01

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. – [S.I.] : Lembaga Informasi nasional Republik Indonesia, 2002. - JURBIB OVZEER 910 W-01

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7, tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita serta penjelesannya dan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional serta panduan pelaksanaan Inpres no. 9 tahun 2000 / diterbitkan oleh: Departemen Agama, Proyek Pengarusutamaan Gender. - [S.l. : Proyek tsb.], 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-01

Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. – Jilid 2003-I / [penyusunan Tim Redaksi CV. Citra Mandiri], 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-01

UUD 45 perubahannya : susunan Kabinet RI lengkap / red.: Redaksi Kawan Pustaka. - [Jakarta] : Kawan Pustaka, [2004]. – JURBIB OVZEER 910 W-01

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 40 tahun 2004 tentang rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia tahun 2004-2009. - [Jakarta] : Departemen Komunikasi dan Informatika, [2004]. - JURBIB OVZEER 910 W-01

Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, tahun 2005, jilid 1. - [penyusunan Tim Redaksi CV. Citra Mandiri]. - Jakarta : Citra Mandiri, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-01

Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, tahun 2005, jilid 2. - [penyusunan Tim Redaksi CV. Citra Mandiri]. - Jakarta : Citra Mandiri, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-01

Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia / Tim Redaksi CV. Citra Mandiri. - Jil. 2005-II. - Jakarta : Citra Mandiri, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-01

Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. - Jil. 2005-III. / [penyusunan Tim Redaksi CV. Citra Mandiri]. - Jakarta : Citra Mandiri, [2005 – JURBIB OVZEER 910 W-01

Himpunan keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bidang sisminbakum. - [Jakarta] : Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2006. - JURBIB OVZEER 910 W-01

W 02 Budget; Public finance

Keputusan Presiden R.I. nomor 6 tahun 1999 tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 16 tahun 1994 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali / diubah terakhir dengan keputusan presiden nomor 8 tahun 1997 / pimpinan: H. Nursyahid - Jakarta : Panca Usaha, 1999. – JURBIB OVZEER 910 W-02

Keputusan Presiden R.I. nomor 17 tahun 2000 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2000 / pimpinan : Sukarno ... [et al.]. - [Jakarta] : Mini Jaya Abadi, 2000. – JURBIB OVZEER 910 W-02

Tata cara pelaksanaan pembukuan dan pelaporan keuangan pada departemen/lembaga dengan sistem akuntansi tahun 2002 : Kep. Men. Keu. R.I. nomor 295/KM.012/2001 : dilampiri, SE. Dit. Jen. Anggaran yang berkenaan dengan pelaksanaan APBN/bantuan luar negeri. - Jakarta : Binatama Raya, 2001. – JURBIB OVZEER 910 W-02

Rencana pembangung tahunan (Repeta) tahun 2002; lampiran UU R.I. nomor 19 tahun 2001 tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2002 / pimpinan: Karnadi. – Jakarta : Cipta Jaya, 2002 - JURBIB OVZEER 910 W-02

Standar akuntansi keuangan pemerintah pusat/daerah & petunjuk pelaksanaan perpajakan. - [Jakarta] : Kerukunan Pensiunan Departemen Keuangan, [2003]. - JURBIB OVZEER 910 W-02

Petunjuk teknis pelaksanaan Keppres nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara / pimpinan: H. Nursyahid – Jakarta : Panca Usaha, 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-02

Undang-undang R.I. nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara. – Jakarta: Eko Jaya, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-02

Petunjuk teknis Keppres no. 42 Tahun 2002 : tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara Tahun 2003. – Jakarta : CV. Tamita Utama, 2003. - JURBIB OVZEER 910 W-02

Rancangan UU RI nomor ... tahun 2005 tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2004. – [S.I.] : Republik Indonesia, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-02

Undang-Undang R.I. nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara / pimpinan : Karnadi. - Jakarta : Cipta Jaya, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-02

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 beserta rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2005. - Jakarta : Eko Jaya, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-02

3 undang-undang Bidang Keuangan : Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara / [diterbitkan oleh: Eko Jaya]. - Jakarta : Eko Jaya, 2004. - JURBIB OVZEER 910 W-02

Petunjuk teknis mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan APBN : bagi pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. – [S.l. : s.n., 2004]. - JURBIB OVZEER 910 W-02

Undang-undang no. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah tahun 2004. - Jakarta : Tamita Utama, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-02

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Keuangan Negara : rencana kerja pemerintah, penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga : dilengkapi pengurusan dan penghapusan piutang negara pada instansi pemerintah berkaitan dengan otonomi daerah. - Cet. 1. - Jakarta : Eko Jaya, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-02

Peraturan pemerintah RI nomor 22 tahun 2005 tentang pemeriksaan penerimaan Negara bukan pajak dan peraturan pemerintah RI nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum, Jakarta : Eko Jaya, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-02

Peraturan pelaksanaan undang-undang perbendaharaan Negara. – Jakarta: Cipta Jaya, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-02

Peraturan pemerintah R.I. nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan / pimpinan: Karnadi – Jakarta : Cipta Jaya, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-02

Standar akuntansi pemerintahan. - [Bandung] : Fokusmedia, [2005]. – JURBIB OVZEER 910 W-02

Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat / Karnadi. – Jakarta : BP. Cipta Jaya, 2005. - JURBIB OVZEER 910 W-02

Keppres tentang APBN, APBD dan DIPA petunjuk pelaksanaannya tahun 2002-2006. - Jakarta : Tamita Utama, 2006. – JURBIB OVZEER 910 W-02

Peraturan Pemerintah R.I. nomor 6 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah / [staf red.: Wahyudin ... et al. ; pimpinan: Karnadi]. - Jakarta : Cipta Jaya, 2006. – JURBIB OVZEER 910 W-02

Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahan keempat atas keputusan presiden Nomor 80 Tahun 2003, tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah / Karnadi. – JURBIB OVZEER 910 W-02

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang : tata cara pengadaan pinjaman dan/atau penerimaan hibah serta penerusan

pinjaman dan/atau hibah luar negeri. – Jakarta : CV. Medya Duta, [2006]. – JURBIB OVZEER 910 W-02

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2006 beserta rencana kerja pemerintah (RKP) Tahun 2006. – Jakarta : CV. Eko Jaya, 2006. – JURBIB OVZEER 910 W-02

Peraturan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. – Jakarta : CV. Eko Jaya, 2006. – JURBIB OVZEER 910 W-02

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun anggaran 2006 / Presiden Republik Indonesia. – Bappenas : Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, [2006]. - JURBIB OVZEER 910 W-02

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan / H. Nursyahid. – Jakarta : BP. Panca Usaha, 2006. - JURBIB OVZEER 910 W-02

Pedoman bendaharawan tentang pengelolaan/pelaporan keuangan Negara/daerah / H. Nursyahid. – Jakarta : BP. Panca Usaha, 2006. - JURBIB OVZEER 910 W-02

Peraturan menteri keuangan nomor 96/PMK.02/2006 tentang standar biaya tahun anggaran 2007. – Jakarta : CV. Eko Jaya, 2006. - JURBIB OVZEER 910 W-02

W 03 Governments; Political parties; Elections; Press

Collection of election laws / National Election Commission. – [S.l. : s.n., ca. 1999]. - JURBIB OVZEER 910 W-03

Himpunan undang-undang dan peraturan pemerintah bidang politik / Komisi Pemilihan Umum. - [Jakarta] : Komisi tsb, 1999. – JURBIB OVZEER 910 W-03

Undang-undang Republik Indonesia nomor 22, tahun 2003, tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. - [Yogyakarta : Pustaka Widyatama], 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-03

Hukum Jurnalistik : himpunan perundangan mengenai pers dan penyiaran. - [Yogyakarta : Pustaka Widyatama], 2003.- JURBIB OVZEER 910 W-03

Undang-undang RI nomor 22 dan 23 tahun 2003 tentang susunan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden / pimpinan: H. Nursyahid - Jakarta : Panca Usaha, 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-03

Undang-undang tentang pemilu dan parpol tahun 2003 – Jakarta : Tamita Utama, 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-03

Undang-undang RI nomor 23 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dan UU RI nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden . – [S.I.] : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-03

UU RI nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. - [S.I.] : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2003. –JURBIB OVZEER 910 W-03

Kerangka hukum pemilu Indonesia tahun 2004 : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Partai Politik tahun 2002, Undang-Undang Pemilu tahun 2003 : tinjauan awal Juni 2003 / [penulis: Hadar N. Gumay, Muhammad Qodari, Syamsuddin Haris]. - Ed. ke-2 – [Jakarta] : International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-03

Himpunan undang-undang bidang politik / Komisi Pemilihan Umum (KPU). - Jakarta : Komisi tsb., 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-03

UU RI nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden (dalam Tanya jawab). – (Seri publikasi, no. 15/2003) – [Jakarta] : Komisi Pemilihan Umum, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-03

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 39 tahun 2005 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2006. - Jakarta : Eko Jaya, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-03

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009 : dilengkapi, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. - Jakarta : Eko Jaya, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-03

Undang-undang Pers. - [Yogyakarta] : Pustaka Pelajar, [2006]. – JURBIB OVZEER 910 W-03

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum. – Jakarta : CV. Eko Jaya, 2007. - JURBIB OVZEER 910 W-03

Kompilasi hukum tata Negara. – Edisi Paling Lengkap. – [S.I.] : RIAK, 2007. - JURBIB OVZEER 910 W-03

W 04 Citizenship

Peraturan pewarganegaraan dan ketentuan penunjang lainnya / Direktorat jenderal hukum dan perundang-undangan departemen hukum dan perundang-undangan. – [Jakarta] : Pengayoman, [1997]. - JURBIB OVZEER 910 W-04

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. - Jakarta : Eko Jaya, 2006. - JURBIB OVZEER 910 W-04

W 05 The judiciary; Arbitration; Legal profession, legal aid

English translation on laws concerning judiciary. - [Jakarta] : Mahkamah Agung RI, 2000. – JURBIB OVZEER 910 W-05

Himpunan SK rekomendasi IJIN kerja AHLI hukum WNA tahun 1997-2000 / Direktorat jenderal administrasi hukum umum departemen kehakiman dan hak asasi manusia, Republik Indonesia. – [Jakarta : Pengayoman], 2000. - JURBIB OVZEER 910 W-05

Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2003. - Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2003. JURBIB OVZEER 910 W-05

Pedoman peraturan tentang kenotaris di Indonesia : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia nomor M.01-HT.03.01 tahun 2003. - Jakarta : Mitra Darmawan, 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-05

Himpunan peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman, mahkamah agung, peradilan umum, peradilan tata usaha Negara, peradilan agama, Kejaksaan RI, Hukum disiplin prajuribt abri, mobilisasi danb demobilisasi, kepolisian Negara RI, peradilan militer/ dihimpun oleh: Mahkamah Agung, RI, 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-05

UU RI nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. – [S.I.] : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2003. –JURBIB OVZEER 910 W-05

Himpunan keputusan menteri kehakiman RI tahun 1997, 1998 dan 1999 – [Jakarta]: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-05

UU RI no. 24 tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi / ed.: Yudha Panud.
– Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2004. – JURBIB OVZEER 910
W-05

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman : & Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2004
Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 Tentang
Mahkamah Agung : dilengkapi UURI nomor 14 tahun 1985 Tentang
Mahkamah Agung, UURI nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Jakarta : Eko Jaya, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-05

Undang-undang RI no. 18 tahun 2003 tentang advokat / ed.: Yudha Pandu. –
Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2004. – JURBIB OVZEER 910
W-05

Undang-undang no. 8 tentang peradilan umum, undang-undang no. 9
tentang PTUN tahun 2004. - Jakarta : Penerbit CV. Tamita Utama, 2004. –
JURBIB OVZEER 910 W-05

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2004 Tentang Perubahan
atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum : &
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan
atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara. - Jakarta : Eko Jaya, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-05

Himpunan undang-undang peradilan. - Jakarta : Sinar Grafika, 2004. –
JURBIB OVZEER 910 W-05

Undang-undang no. 4-5 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung
dan Mahkamah Konstitusi tahun 2004 : dilengkapi Undang-undang
Kejaksaan, Undang-undang Peralidlan Umum. - Jakarta : Penerbit CV. Tamita
Utama, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-05

Kitab undang-undang Peradilan Umum / [disusun oleh] Eman Suparman. -
Bandung : Fokusmedia, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-05

Himpunan undang-undang lengkap tentang badan peradilan / Akhmad
Fauzan. - Bandung : Yrama Widya, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-05

Himpunan peraturan perundang-undangan tentang penyatuatapan peradilan
agama ke mahkamah agung. - [Jakarta] : Proyek tsb., 2004. – JURBIB
OVZEER 910 W-05

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara / dihimpun oleh Hadi Setia Tunggal. - [Jakarta] : Harvarindo, [2004].
– JURBIB OVZEER 910 W-05

Perundang-undangan lengkap tentang peradilan umum, peradilan khusus, dan Mahkamah Konstitusi / [dihimpun oleh] Achmad Fauzan. - [Jakarta] : Kencana, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-05

Kumpulan Undang-undang peradilan terbaru : terdiri dari UU Mahkamah Agung - UU Peradilan Umum - UU Peradilan Tata Usaha Negara - UU Pengadilan Pajak - Keppres Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Propinsi NAD beserta penjelasannya. - Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-05

Himpunan Undang-Undang penting untuk aparat penegak hukum : kepolisian, kejaksaan, kehakiman, mahkamah agung, advokat / oleh Widyopramono. – Jakarta [etc.] : Litera AntarNusa, 2005. - JURBIB OVZEER 910 W-05

Peraturan pelaksanaan Undang-undang Mahkamah Konstitusi / dihimpun oleh Hadi Setia Tunggal. - [Jakarta] : Harvarindo, 2006. - JURBIB OVZEER 910 W-05

Himpunan lengkap peraturan perundang-undangan tentang : badan peradilan dan penegakan hukum : peradilan umum, mahkamah agung, mahkamah konstitusi, komisi yudisial, advokat, kepolisian, kejaksaan, masyarakat, grasi, mediasi / dihimpun oleh : Sentosa Sembiring. – Bandung : Nuansa Aulia, 2006. - JURBIB OVZEER 910 W-05

W 06 Public health; Public welfare; Social insurance; Pensions

Himpunan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan, tahun 1999/2000. - Jakarta : Departemen Kesehatan RI, 2000. – JURBIB OVZEER 910 W-06

3 undang-undang bidang hukum dan social budaya – kesehatan, psikotropika, narkotika – Jakarta : Eko Jaya, 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-06

Himpunan peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan sosial (buku I) cetakan keempat. – Jakarta : Biro Kepegawaian dan hukum departemen sosial R.I., 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-06

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ; dilengkapi: peraturan/keputusan menteri kesehatan tahun 2004. - Jakarta : Eko Jaya, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-06

Undang-undang praktik kedokteran : kumpulan peraturan perundangan tentang praktik kedokteran. - [Yogyakarta] : Yustisia, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-06

Undang-Undang praktik kedokteran. – Yogyakarta : Langgeng Pustaka, cop. 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-06

Abstrak : peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan social / Cetakan Kedua. – Jakarta : Biro Kepegawaian Dan Hukum, Departemen Sosial RI, 2005. - JURBIB OVZEER 910 W-06

Kompilasi peraturan perundang-undangan tentang narkoba / Zulkarnain Nasution ... [et al.] ; kata sambutan Made Mangku Pastika. – Jakarta : Kencana, 2006. - JURBIB OVZEER 910 W-06

W 07 Housing; Transmigration

Himpunan peraturan kependudukan dan keimigrasian. – Jakarta [etc.] : Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota [etc.], 2000. - JURBIB OVZEER 910 W-07

Immigration Guidance on Business and Tourism in Indonesia : Immigration Guidance 2002-2003 / Republic of Indonesia. – Jakarta : Pintu Gerbang, [2003]. - JURBIB OVZEER 910 W-07

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. – Jakarta : BP. Panca Usaha, 2003. - JURBIB OVZEER 910 W-07

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. – Jakarta : CV. Eko Jaya, 2007. - JURBIB OVZEER 910 W-07

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. – Jakarta : CV. Eko Jaya, 2007. - JURBIB OVZEER 910 W-07

W 08 Nature and environment; Mining; Forestry

Himpunana peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan tahun 1996. – [S.I.] : Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan, 1998. – JURBIB OVZEER 910 W-08

Peraturan sanksi lingkungan hidup di Indonesia : tema, "Selamatkan bumi kita demi masa depan.". - Jakarta : Eko Jaya, [1999]. – JURBIB OVZEER 910 W-08

Kumpulan peraturan perundang undangan di bidang lingkungan. – [Jakarta] : Biro Lingkungan dan Teknologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, 2000. – JURBIB OVZEER 910 W-08

Keputusan menteri Negara lingkungan hidup R./I. nomor 5 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja kementerian lingkungan hidup R.I. – [S.I.] : Kementerian Lingkungan Hidup, 2002. – JURBIB OVZEER 910 W-08

Himpunan perundang-undangan bidang kehutanan tahun 2001/2002 / Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Kehutanan. - Jakarta : Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Kehutanan, 2002. – JURBIB OVZEER 910 W-08

Government regulation of the R.I. no. 35 of 2002 regarding afforestation fund. – Jakarta: Sekretariat General of the Ministry of Forest and Plantation, 2003. (2x)- JURBIB OVZEER 910 W-08

Himpunan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan tahun 2002. – Jakarta : Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan, 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-08

Peraturan perundang-undangan. – Jilid I. – [Jakarta] : Kementerian Lingkungan Hidup, [ca. 2003]. – JURBIB OVZEER 910 W-08

Peraturan perundang-undangan. – Jilid II. – [Jakarta] : Kementerian Lingkungan Hidup, [ca. 2003]. – JURBIB OVZEER 910 W-08

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 28 tahun 2003 tentang pedoman teknis pengkajian pemanfaatan air limbah dari industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 29 tahun 2003 tentang pedoman syarat dan tata cara perizinan pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 37 tahun 2003 tentang metoda analisis kualitas air permukaan dan pengambilan contoh air permukaan / Kementerian Lingkungan Hidup. - Jakarta : Kementerian tsb., 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-08

Law number 41 of 1999 Regarding Forestry : authorized translation. - Jakarta : Sekretariat General of the Ministry of Forest and Plantation, 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-08

Government regulation of the Republic of Indonesia number 34 of 2002 regarding forest arrangement and forest management, forest utilization, and forest area use planning : authorized translation. - Jakarta : Sekretariat General of the Ministry of Forest and Plantation, 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-08

Undang-Undang konservasi sumber daya alam dan kehutanan : berikut peraturan pelaksanaannya. - [Surabaya] : Karya Anda, [2003]. - - JURBIB OVZEER 910 W-08

4 undang-undang : sumber daya air, panas bumi, minyak dan gas bumi, penataan ruang. - Jakarta : Eko Jaya, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-08

Himpunan peraturan pengelolaan lingkungan hidup tahun 1997-2004. - Ed. Lengkap. - Jakarta : Tamita Utama, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-08

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. - [Yogyakarta : Pustaka Widyatama], 2004. JURBIB OVZEER 910 W-08

Undang-Undang Perkebunan, Kehutanan, Perikanan. - Jakarta : Eko Jaya, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-08

Himpunan ringkasan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan dan konservasi hayati : di lengkapi beberapa artikel / Budi Riyanto, Dudy Mempawardi Saragih. - Bogor : Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-08

Himpunan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan tahun 2003. - [Jakarta] : Sekretariat tsb., 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-08

Himpunan peraturan pengelolaan lingkungan hidup. – DL. 1 - Jakarta : Eko Jaya, 2004- JURBIB OVZEER 910 W-08

Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan – Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan, 2005. – JURBIB OVZEER W-08

Tindak lanjut peraturan perundang-undangan mengenai kehutanan dan lingkungan hidup. – Jakarta : BP. Cipta Karya, 2005. - JURBIB OVZEER 910 W-08

Peraturan menteri kehutanan : nomor: P.13/Menhut-II/2005 : Tanggal: 6 Mei 2005 : tentang organisasi dan tata kerja departemen kehutanan. – Jakarta : Biro Hukum Dan Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan, 2005. - JURBIB OVZEER 910 W-08

Himpunan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup: tentang pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran dan / atua perusaka laut, dan pengendalian pencemaran udara. - [Jakarta] : Departemen Komunikasi dan Informatika, 2005. - JURBIB OVZEER W-08

Undang-Undang minyak & gas bumi beserta peraturan pelaksanaannya / dihimpun oleh: Hadi Setia Tunggal. – [Jakarta] : Harvarindo, 2005. - JURBIB OVZEER 910 W-08

Peraturan pelaksanaan Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup / dihimpun oleh Hadi Setia Tunggal. - [Jakarta] : Harvarindo, 2006. – JURBIB OVZEER 910 W-08

Himpunan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup : bahan-bahan yang merusak lapisan ozon, Pengawasan perpindahahn lintas bats limbah berbahaya & pembuangannya / dihimpun oleh Hadi Setia Tunggal. - [Jakarta] : Harvarindo, 2006 – JURBIB OVZEER 910 W-08

Undang-undang kehutanan dan illegal logging : himpunan peraturan perundang-undangan. – Bandung : Fokusmedia, 2007. - JURBIB OVZEER 910 W-08

W 09 Administrative law; Civil servants; Organisation of ministries ; State Enterprises

Pedoman peran serta pengusaha kecil, menengahkan koperasi dalam pengadaan barang /jasa instansi pemerintah / pimpinan: H. Nursyahid - Jakarta : Panca Usaha, 1997. – JURBIB OVZEER 910 W-09

Himpunan peraturan tentang Lembaga Administrasi Negara. - [Jakarta] : Bagian Perencanaan, Hukum dan Organisasi, Sekretariat Lembaga Administrasi Negara, 1999. – JURBIB OVZEER 910 W-09

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. – [S.l.] : Komisi Pemilihan Umum, [ca. 1999]. - JURBIB OVZEER 910 W-09

Tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan jabatan struktural, fungsional bagi pegawai negeri sipil, pejabat negara dan pensiunan / pimpinan: Karnadi – Jakarta : Cipta Jaya, 2000. – JURBIB OVZEER 910 W-09

Peraturan perundang-undangan pegawai negeri sipil menuju era Indonesia baru / pimpinan: H. Nursyahid - Jakarta : Panca Usaha, 2000. – JURBIB OVZEER 910 W-09

Peraturan pemerintah RI nomor 96, 97, 98, 99, 100 dan 101 tahun 2000 : wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil; formasi pegawai negeri sipil; pengadaan pegawai negeri sipil; kenaikan pangkat pegawai negeri sipil; pengkatan PNS dalam jabatan structural; pendidikan dan pelatihan jabatan PNS. – Jakarta : Panca Usaha, 2000. – JURBIB OVZEER 910 W-09

Peraturan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dalam memasuki era reformasi / pimpinan: H. Nursyahid – Jakarta : Panca Usaha, 2000. – JURBIB OVZEER 910 W-09

Himpunan keputusan : tentang pengangkatan dan pemberhentian PPNS berdasarkan unit kerja tahun 1985 S/D 1986 / Direktorat jenderal adminstrasi hukum umum departemen Kehakiman dan hak asasi Manusia Republik Indonesia. - [Jakarta] : Pengayoman, [2000]. - JURBIB OVZEER 910 W-09

Peraturan pemerintah RI tentang penyesuaian gaji pokok baru pegawai negeri sipil (PNS) 2001 / pimpinan Sukarno. – [Jakarta] : Sekala Jalmakarya, 2001. – JURBIB OVZEER 910 W-09

Keputusan menteri kebudayaan dan pariwisata : Nomor: KEP-06/KM KP/2001 : tentang organisasi dan tata kerja departemen kebudayaan dan pariwisata. – Tahun : Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2001. - JURBIB OVZEER 910 W-09

Peraturan pemerintah RI : nomor 11 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 98 tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil; nomor 12 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil; nomor 13 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan structural / pimpinan: H. Nursyahid – Jakarta : Panca Usaha, 2002. – JURBIB OVZEER 910 W-09

Himpunan peraturan perundang-undangan Departemen dalam Negeri tahun 2002 / [dihimpun oleh] Indonesia , Departemen Dalam Negeri. - [Jakarta] : Pusat Kajian Hukum Sekretariat Jenderal, Departemen Dalam Negeri, [2002]. – JURBIB OVZEER 910 W-09

Keputusan kepala badan kepegawaian Negara dan kepala lembaga administrasi Negara tahun 2001 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah RI nomor: 96, 97, 98, 99, 100 & 101 tahun 2000 / dihimpun oleh Zainut Tauhid Saasi. – Jakarta : Panca Usaha, 2002. – JURBIB OVZEER 910 W-09

Peraturan pemerintah R.I. nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil / / pimpinan: H. Nursyahid - Jakarta : Panca Usaha, 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-09

Peraturan-Peraturan jabatan fungsional perencana / Republik Indonesia. – Bappenas : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-09

Pedoman bagi pegawai negeri sipil/ diterbitkan oleh: Eko Jaya, CV (Firm). - Jakarta : Eko Jaya, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-09

Himpunan tindak lanjut peraturan kepegawaian tahun 2004 / pimpinan : Karnadi. - Jakarta : Cipta Jaya, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-09

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 2004 tentang larangan pegawai negeri sipil menjadi anggota partai politik & Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan

jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. - Jakarta : Eko Jaya, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-09

Pedoman pengawasan melekat (waskat). - Jakarta : Eko Jaya, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-09

Himpunan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. – Jilid I / Departemen Agama , Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal. - [Jakarta] : Proyek tsb, [2004-]. –JURBIB OVZEER 910 W-09

Petunjuk teknis peraturan pelaksanaan UU kepegawaian : keputusan kepala badan kepegawaian Negara / disusun oleh: S. Wongso Sa'ban ; pimpinan: Karnadi – Jakarta : Cipta Jaya, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-09

Peraturan pemerintah R.I. tentang pegawai negeri sipil / [pimpinan: Karnadi]. – Jakarta : Cipta Jaya, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-09

Peraturan presiden R.I. nomor 32 tahun 2005 tentang perubahan kedua atas keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah / pimpinan: Karnadi – Jakarta : Cipta Jaya, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-09

Peraturan Presiden R.I : kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, kewenangan dan tata kerja kementerian Negara dan lembaga pemerintah non departemen – tunjangan jabatan fungsional structural – Jakarta : Eko Jaya, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-09

Peraturan menteri Negara pemberdayaan perempuan Republik Indonesia : Nomor: P.01/MENEG PP/V/2005 : tentang organisasi dan tata kerja kementerian Negara pemberdayaan perempuan. – Jakarta, Tahun : Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, 2005. - JURBIB OVZEER 910 W-09

Pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan rangkap & pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. – Jakarta : CV. Eko Jaya, 2005. - JURBIB OVZEER 910 W-09

Himpunan peraturan kependudukan tahun 2005-2006. – Jakarta: Tamita Utama, 2006. – JURBIB OVZEER 910 W-09

Peraturan presiden Republik Indonesia nomor 85 tahun 2006 tentang perubahan keenam atas keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. – Jakarta : CV. Eko Jaya, 2006. - JURBIB OVZEER 910 W-09

Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik Negara. – Jakarta : Departemen Komunikasi dan Informatika, 2006. - JURBIB OVZEER 910 W-09

Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik Negara. – Jakarta : Departemen Komunikasi dan informatika, 2006. - JURBIB OVZEER 910 W-09

W 10 Regional government; Local administration

Peraturan praktis bagi penyelenggara otonomi daerah / [penerbitan] Eko Jaya, Suppl.: 6,7,8,9. - JURBIB OVZEER 910 W-10

Petunjuk pelaksanaan UU Otonomi Daerah dan UU Korupsi, Kolusi, Nepotisme di Indonesia tahun 1999. – Jakarta : Tamita Utama, 1999. – JURBIB OVZEER 910 W-10

Petunjuk pelaksanaan pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antar pusat dan daerah dan undang-undang tentang pemerintahan propinsi daerah khusus ibukota Negara R.I. Jakarta tahun 1999 / 2000 / pimpinan: Karnadi. – Jakarta : Cipta Jaya, 1999 -JURBIB OVZEER 910 W-10

Kumpulan peraturan peraturan perpajakan seri pemeriksaan tahun 2000 – Jakarta : Cipta Jaya, 2000. – JURBIB OVZEER 910 W- 10

Keputusan Presiden RI nomor 84 tahun 2000 tentang perubahan atas keputusan Presiden nomor 49 tahun 2000 tentang dewan pertimbangan otonomi daerah / pimpinan: H. Nursyahid – Jakarta : Panca Usaha, 2000. – JURBIB OVZEER 910 W-10

Peraturan pelaksanaan UU pajak daerah dan retribusi daerah (Peraturan pemerintah RI nomor 65 & 66 tahun 2001) / pimpinan: H. Nursyahid – Jakarta : Panca Usaha, 2001. – JURBIB OVZEER 910 W-10

Peraturan pemerintah RI tentang pengamanan dan pengalihan barang milik/kekayaan negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah beserta informasi keuangan daerah. - Jakarta: Panca Usaha, 2001. – JURBIB OVZEER 910 W-10

Undang undang R.I. nomor 34 tahun 2000 tentang perubhahn atas uu nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah / pimpinan: H. Nursyahid - Jakarta : Panca Usaha, 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-10
Peraturan pemerintah RI nomor 65 tahun 2001, nomor 66 tahun 2001 tentang pajak & retribusi daerah dan retribusi daerah / [pimpinan Sukarno].- Jakarta : Mini Jaya Abadi, 2001. – JURBIB OVZEER 910 W-10

Buku panduan bendaharawan dan pemegang kas pemerintah daerah sebagai wajib pungut pajak-pajak Negara. – Tahun : Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2002. - JURBIB OVZEER 910 W-10

Himpunan peraturan perundang-undangan bidang otonomi daerah. - [Jakarta] : Sekretariat tsb., 2002. – JURBIB OVZEER 910 W-10

Peraturan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah / dihimpun oleh Hadi Setia Tunggal. - Jakarta : Harvarindo, 2002-. Buku keempat. – JURBIB OVZEER 910 W-10-IV

Peraturan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah / dihimpun oleh Hadi Setia Tunggal. - Jakarta : Harvarindo, 2002-. Buku kelima. – JURBIB OVZEER 910 W-10-V

Himpunan peraturan perundangan pendukung pelaksanaan dekonsentrasi : diseminasi dan ekspose kebijakan dekonsentrasi. - [Jakarta] : Sekretariat Jenderal-Depdagri, 2003. JURBIB OVZEER 910 W-10

Peraturan pemerintah R.I. no. 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah / pimpinan: Karnadi – Jakarta : Cipta Jaya, 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-10

Perencanaan, pelaksanaan/penattausahaan, dan pemantauan penerusan pinjaman luar negeri pemerintah kepada daerah / pimpinan: Karnadi – Jakarta : Cipta Jaya, 2003. JURBIB OVZEER 910 W-10

Himpunan peraturan pemerintah daerah tahun 2003 / pimpinan: Karnadi – Jakarta : Cipta Jaya, 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-10

City of the Republic of Indonesia Jakarta. - [Jakarta] : Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-10

Informasi standar teknis pelaksanaan pemberian surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) di daerah / Direktorat Jenderal Perdagangan dalam Negeri. Departemen Perindustrian dan Perdagangan. - [Jakarta] : Direktorat Jenderal Perdagangan dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-10

Surat keputusan menteri dalam negeri RI nomor 6 tahun 2003 tentang pedoman pengawasan fungsional penyelenggaraan pemerintah daerah dan keputusan menteri dalam negeri RI nomor 10 tahun 2003 tentang pedoman pemeriksaan khusus dalam rangka serah terima jabatan gubernur / pimpinan: H. Nursyahid – Jakarta : Panca Usaha, 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-10

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah / Menteri Kehutanan. – [S.I.] : Departemen Kehutanan, 2004. - JURBIB OVZEER 910 W-10

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah / Menteri Kehutanan. – [S.I.] : Departemen Kehutanan, 2004. - JURBIB OVZEER 910 W-10

Himpunan peraturan pemerintah daerah tahun 2003 / pimpinan: Karnadi – Jakarta : Cipta Jaya, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-10

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. - Jakarta : Panca Usaha Putra, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-10

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2004 kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah & Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman penyusunan peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah. - Jakarta : Eko Jaya, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-10

Buku petunjuk pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah. – Jakarta: Panca Usaha, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-10

Sistem akuntansi dan laporan keuangan pemerintah / pimpinan: Karnadi. – Jakarta : Citpa Jaya, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-10

Peraturan pemerintah pengganti uu nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas uu nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan pp RI nomor 17 tahun 2005 tentang perubahan atas pp nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jakarta: Eko Jaya, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-10

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah = Act of the Republic of Indonesia number 22 year 1999 on Regional Administration, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta = Act of the Republic of Indonesia number 34 year 1999 on Provincial Government of the Special Territory of the Capital Peraturan praktis bagi penyelenggara otonomi daerah- Suplemen 10. - Jakarta : Eko Jaya, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-10

Undang-undang otonomi daerah terbaru : terdiri dari UU Pemerintahan Daerah, UU Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, PP tentang dana alokasi umum daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota tahun anggaran 2005 beserta penjelasannya. - Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-10

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan Menteri dalam Negeri nomor 12 tahun 2005 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja pemilihan kepala daerah dan

wakil kepala daerah. - [Jakarta] : Citra Utama, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-10

Himpunan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. - [Jakarta] : Departemen Komunikasi dan Informatika, 2005. – JURBIB OVZEER W-10

Pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah / pimpinan: Karnadi – Jakarta : Cipta Jaya, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-10

Perpu no. 3 tahun 2005 & peraturan pemerintah no. 17 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang daerah dan pilkada / pimpinan: Karnadi – Jakarta : Cipta Jaya, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-10

Petunjuk teknis mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan APBN dan pengelolaan bagina anggaran pembiayaan dan perhitungan / pimpinan: Karnadi – Jakarta : Cipta Jaya, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-10

Pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah propinsi, kabupaten / kota tahun 2005 / pimpinan: Karnadi – Jakarta : Cipta Jaya, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-10

Pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pilkada (Per.men. dagri no. 9 tahun 2005) / pimpinan: Karnadi – Jakarta : Cipta Jaya, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-10

Peraturan pemerintah R.I. nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah / pimpinan: Karnadi – Jakarta : Cipta Jaya, 2005. JURBIB OVZEER 910 W-10

Himpunan peraturan pajak daerah dan retribusi daerah / Jakarta : Eko Jaya, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-10

Peraturan pemerintah RI nomor 37 tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan RI nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah / penyunting Syariffudin. – [Jakarta] : Citra Utama, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-10

Kebijakan menteri dalam negeri tentang keluharan. – Jakarta : CV. Medya Duta, [2005]. - JURBIB OVZEER 910 W-10

Pedoman pembayaran dalam pelaksanaan : APBN petunjuk teknis DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) sasaran inflasi Tahun 2005-2007. – Jakarta : CV. Tamita Utama, 2005. - JURBIB OVZEER 910 W-10

Pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah / Sumaryo Budi R.. – Jakarta : CV. Citra Utama, 2005. - JURBIB OVZEER 910 W-10

Tata cara penghapusan piutang Negara/dareah dan pinjaman daerah. – Jakarta : CV. Eko Jaya, 2005. - JURBIB OVZEER 910 W-10

Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. - [Jakarta] : Departemen Komunikasi dan Informatika, 2005. - JURBIB OVZEER 910 W-10

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah & Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 25 Tahun 2004. – Jakarta : CV. Citra Utama, 2006. - JURBIB OVZEER 910 W-10

Perubahan peraturan kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD (PP. Nomor 37 Tahun 2005) & perudahan peraturan pedoman penyusunan peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah (PP. Nomor 53 Tahun 2005). – Jakarta : CV. Eko Jaya, 2006. - JURBIB OVZEER 910 W-10

Peraturan praktis bagi penyelenggara otonomi daerah : suplemen 11 - Jakarta : Eko Jaya, 2006. – JURBIB OVZEER 910 W-10

Himpunan lengkap undang-undang tentang pemerintahan daerah distertai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait / dihimpun oleh Sentosa Sembiring. - [Bandung] : Nuansa Aulia, [2006]. - JURBIB OVZEER 910 W-10

Peraturan pelaksanaan undang-undang pemerintahan daerah Tahun 2006 / Karnadi. – JURBIB OVZEER 910 W-10

Peraturan pemerintah R.I. Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara/dareah / Karnadi. – Jakarta : BP. Cipta Jaya, 2006. – JURBIB OVZEER 910 W-10

Pedoman pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara & pengelolaan keuangan daerah / Karnadi. – Jakarta : BP. Cipta Jaya, 2006. – JURBIB OVZEER 910 W-10

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Jakarta : BP. Restino Mediamata, 2006. - JURBIB OVZEER 910 W-10

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang pinjaman daerah : & peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 74

Tahun 2005 tentang dana alokasi umum / Sumaryo Budi R.. – Jakarta : CV. Citra Utama, 2006. – JURBIB OVZEER 910 W-10

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah / Karnadi. – Jakarta : BP. Cipta Jaya, 2006. - JURBIB OVZEER 910 W-10

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa : & peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan / Sumaryo Budi R.. – Jakarta : CV. Citra Utama, 2006. - JURBIB OVZEER 910 W-10

Peraturan pelaksanaan pemerintahan daerah pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal : desa : kelurahan : pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. – Jakarta : CV. Eko Jaya, 2006. - JURBIB OVZEER 910 W-10

Peraturan praktis bagi penyelenggara otonomi daerah : suplemen 12. – Jakarta : CV. Eko Jaya, 2006. - JURBIB OVZEER 910 W-10

Petunjuk pelaksanaan tentang peraturan desa & kelurahan. – Jakarta : CV. Medya Duta, [2006]. - JURBIB OVZEER 910 W-10

Petunjuk pelaksana peraturan pemerintah nomor 72 & 73 tentang desa & kelurahan tahun 2006 / pimpinan redaksi: Sumaryo Budi R.. – Jakarta : CV. Citra Utama, 2006. - JURBIB OVZEER 910 W-10

Himpunan peraturan desa dan kelurahan tahun 2006. – Jakarta : CV. Eko Jaya, 2006. - JURBIB OVZEER 910 W-10

Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat (PP. nomor 3 Tahun 2007) & investasi pemerintah (PP. nomor 8 Tahun 2007). – Jakarta : CV. Eko Jaya, 2007. - JURBIB OVZEER 910 W-10

W 11 Public international law; Immigration policy; Foreign relations

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang pengesahan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999). – [S.I. : s.n., 1999]. - JURBIB OVZEER 910 W-11

Serajah pembentukan undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1997 : tentang pengesahan United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan

psikotropika, 1988) / Direktorat jenderal hukum dan penundang-undangan department hukum dan perundang-undanga Republik Indonesia, tahun 1998-1999. – [Jakarta] : Pengayoman, 1999. - JURBIB OVZEER 910 W-11

W 12 Criminal law; Subversion

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia : UU no. 30/2002, UU no. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU no. 20/2001, UU no. 28/1999, UU no. 3/1971, PP no. 71/2000, organisasi & tata kerja KPK, kode etik pimpinan KPK, ringkasan draft rencana strategis KPK, gratifikasi. – [S.l. : s.n., 200X]. - JURBIB OVZEER 910 W-12

Peraturan perundang-undangan : yang megandung sanksi pidana tahun 1991 S/D 1995 / Direktorat jenderal adminstrasi hukum umum departemen Kehakiman dan hak asasi Manusia Republik Indonesia. – [Jakarta] : Pengayoman, [2000]. - JURBIB OVZEER 910 W-12

Himpunan keputusan tentang grasi tahun 1991 / Direktorat jenderal administrasi hukum umum departemen kehakiman dan hak asasi manusia Republik Indonesia. – [Jakarta] : Pengayoman, [2000]. - JURBIB OVZEER 910 W-12

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2002 : tentang pemberantasan tindak pidana terorisme & peraturan pemerintah pengganti undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 : tentang pemberlakuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2002 : tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, pada peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 oktober 2002 / Departemen kehakiman dan hak asasi manusia Republik Indonesia. – [Jakarta] : Pengayoman, 2002. - JURBIB OVZEER 910 W-12

Himpunan tata naskah dan petunjuk teknis penyelesaian perkara pidana umum Kejaksaan Agung R.I. / Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. – Jilid II. - Jakarta : Jakasa Agung Muda Tindak Pidana Umum. – JURBIB OVZEER 910 W-12

Perpu antiterorisme. - [Yogyakarta : Media Pressindo], 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-12

Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi / ed.: Iko Musmulyadi. – Jakarta : Sari utomo, 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-12

Peraturan pelaksanaan Undang-Undangan tentang Terorisme / dihimpun oleh Hadi Setia Tunggal. - [Jakarta] : Harvarindo, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-12

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga : dilengkapi rencana aksi

nasional hak asasi manusia tahun 2004-2009. - Jakarta : Eko Jaya, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-12

Kompilasi peraturan kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri.- Buku I-VII – [Jakarta] : Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan, 2005-JURBIB OVZEER 910 W-12 I-VII

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan. - Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-12

Himpunan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana di luar KUHP. Jilid 1 t/m Jilid 3 / [dihimpun oleh Mahkamah Agung]. - [Jakarta] : Mahkamah Agung, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-12

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang : penyelenggaraan dan kerja sama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. – Jakarta : CV. Medya Duta, [2006]. - JURBIB OVZEER 910 W-12

Undang-undang pemberantasan tindak pidana anti korupsi. – Cet. I. – Yogyakarta : Pustaka Merah Putih, 2007. - JURBIB OVZEER 910 W-12
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga beserta peraturan pelaksanaannya / dihimpun oleh Hadi Setia Tunggal. - [Jakarta] : Harvarindo, 2006. - JURBIB OVZEER 910 W-12

W 13 Law of criminal procedure

Himpunan bujuklak, bujuklap, dan bujukmin proses penyidikan tindak pidana. - Jakarta : [Kepolisian Negara, Republik Indonesia], [2000].- JURBIB OVZEER 910 W-13

Undang-Undang Republik Indonesia no. 2 dan no. 3 tahun 2002 tentang kepolisian Negara dan pertanahan Negara / pimpinan: H. Nursyahid – Jakarta : Panca Usaha, 2002. – JURBIB OVZEER 910 W-13

Kepolisian Negara Republik Indonesia. - Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Polri, 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-13

Himpunan peraturan perundang-undangan tahun 2004 yang berkaitan dengan tugas Polri / [dihimpun oleh] Kepolisian Negara, Republik Indonesia. - Jakarta : Divisi Pembinaan Hukum Polri, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-13

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. - Jakarta : Panca Usaha Putra, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-13

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional : dan, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 18

tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. – Jakarta : Cipta Karya, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-13

Undang-undang perlindungan saksi dan korban : UU RI nomor 13 tahun 2006. – [S.I.] : Asa Mandiri, 2006. - JURBIB OVZEER 910 W-13

Undang-undang perlindungan saksi dan korban : UU RI nomor 13 tahun 2006. – [S.I.] : Asa Mandiri, 2006. - JURBIB OVZEER 910 W-13

W 14 Tax law

Himpunan tindak lanjut peraturan perpajakan. – Jakarta : Cipta Jaya, 1998. – JURBIB OVZEER 910 W-14

Kumpulan peraturan dibidang penagihan pajak. – Jakarta : Aldo Jaya, 1999. – JURBIB OVZEER 910 W-14

Himpunan peraturan pajak bumi dan bangunan (PBB) Januari '99 s/d/ Desember '99 / pimpinan: Karnadi – Jakarta : Cipta Jaya, 2000. – JURBIB OVZEER 910 W-14

Perlakuan perpajakan atas restrukturisasi perusahaan 2000 / pimpinan: Karnadi. – Jakarta : Cipta Jaya, . 2001. – JURBIB OVZEER 910 W-14

Petunjuk pelaksanaan pemotongan PPh pasal 21 tahun 2001 & norma penghitungan penghasilan neto tahun 2001. - [Jakarta] : Eko Jaya, 2001. – JURBIB OVZEER 910 W-14

Himpunan peraturan pajak pertambahan nilai tahun 2000 / pimpinan: Karnadi. – Jakarta : Cipta Jaya, 2001 - JURBIB OVZEER 910 W-14

Peraturan pelaksanaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 2001. - Jakarta : Myda, 2001. – (Seri pelaksanaan) – JURBIB OVZEER 910 W-14

Kumpulan peraturan pelaksanaan undang-undang perpajakan 2000-2001 : dilengkapi: keputusan : 545/PJ/2000 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan penyeteroran dan pelaporan PPh. Pasal 21 dan 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi – Jakarta : Mitra Karya, 2001. – JURBIB OVZEER 910 W-14

Keputusan menteri keuangan dan dirjen pajak tentang petunjuk pemotongan pajak penghasilan (PPh) 2002 / pimpinan Sukarno. – [Jakarta] : Mini Jaya Anadi, 2002. – JURBIB OVZEER 910 W-14

Himpunan peraturan pajak pertambahan nilai: Januari' 2001 s/d Desember ' 2001 / pimpinan: Karnadi – Jakarta : Citpa Jaya, 2002. – JURBIB OVZEER 910 W-14

Undang-Undang RI tentang pengadilan pajak dan tindak pidana pencucian uang (UU no. 14 dan 15 Tahun 2002) / Harunsyah. – Jakarta : Pancar Utama, 2002. - JURBIB OVZEER 910 W-14

Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Customs Law 10/1995) dan Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai (Excise Law 11/1995) . - [Jakarta] : Sub Direktorat tsb., 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-14

Himpunan lengkap peraturan perpajakan. - Buku 1 / [dihimpun oleh] Dadi Adriana. - Yogyakarta : Penerbit Andi, 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-14

Himpunan lengkap peraturan perpajakan. - Buku 2 / [dihimpun oleh] Dadi Adriana. - Yogyakarta : Penerbit Andi, 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-14

Himpunan peraturan pajak penghasilan tahun 2003 / pimpinan: Karnadi – Jakarta : Cipta Jaya, 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-14

Peraturan tindak lanjut perpajakan (Januari '04-Juni '04.)/ [penerb./penghimpun]: Eko Jaya, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-14

Susunan dalam satu naskah undang-undang perpajakan . - [Jakarta] : TaxSys, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-14

Undang-undang pajak-pajak pusat terbaru / disusun oleh Muda Markus. - Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-14

Peraturan tindak lanjut perpajakan – Juli 2004-Desember 2004 / penerb./penghimpun]: Eko Jaya. - Jakarta : Eko Jaya, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-14

Keputusan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak tentang petunjuk pemotongan pajak penghasilan (PPh), 2005. – Jakarta: Mini Jyaya Abadi, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-14

Peraturan tindak lanjut perpajakan Januari '05 – Juni '05. – Jakarta : Eko Jaya, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-14

Keputusan menteri keuangan dan dirjen pajak tentang pajak pertambahan nilai (PPN) 2005. - pimpinan Sukarno. – [Jakarta] : Mini Jaya Anadi, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-14

Keputusan menteri keuangan dan dirjen pajak tentang petunjuk pemotongan pajak penghasilan (PPh) 2006 / Sukarno DM. – Jakarta : CV. Mini Jaya Abadi, 2006. - JURBIB OVZEER 910 W-14

Keputusan menteri keuangan dan dirjen pajak tentang penambahan nilai (PPN) 2006 / Sukarno DM. – Jakarta : CV. Mini Jaya Abadi, 2006. - JURBIB OVZEER 910 W-14

Himpunan tindak lanjut tentang peraturan export/import 2005. – Jakarta : [s.n.], 2005. - JURBIB OVZEER 910 W-14

Pajak daerah & retribusi daerah : peraturan perundang-undangan. – Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2007. – (Seri Perundang-Undangan). - JURBIB OVZEER 910 W-14

Undang-Undang pajak : dilengkapi dengan UU pajak daerah & retribusi daerah + PTKP 2007. – Jakarta : Mitra Wacana Media, 2007. - JURBIB OVZEER 910 W-14

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan. – Jakarta : CV. Laksana Mandiri, 2006. - JURBIB OVZEER 910 W-14

Peraturan menteri keuangan dan dirjen pajak tentang penghitungan pemotongan pajak penghasilan (PPH) 2007. – Jakarta : CV. Mini Jaya Abadi, 2007. - JURBIB OVZEER 910 W-14

Buku tariff bea masuk Indonesia : berdasarkan AHTN 2007=Indonesian customs tariff book : based on AHTN 2007. – [S.I.] : Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, [2007]. - JURBIB OVZEER 910 W-14

Peraturan menteri keuangan dan dirjen pajak tentang penghitungan pemotongan pajak penghasilan (PPH) 2007. – Jakarta : CV. Mini Jaya Abadi, 2007. - JURBIB OVZEER 910 W-14

Buku tariff bea masuk Indonesia : berdasarkan AHTN 2007=Indonesian customs tariff book : based on AHTN 2007. – [S.I.] : Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, [2007]. - JURBIB OVZEER 910 W-14

W 15 Private law; international private law

Himpunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen : di bidang kelembagaan perlindungan konsumen. – Tahun : Direktorat Perlindungan Konsumen [etc.], 2003. - JURBIB OVZEER 910 W-15

Tata cara peraturan perundang-undangan perkoperasian. - Jakarta : Medya Duta, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-15

Undang-Undang R.I. nomor 30 & 28 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan yayasan. - Jakarta : Cipta Jaya, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-15

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 dan Nomor 41 Tahun 2004 / Maryanto. – Jakarta : CV. Mitra Darmawan, 2004. - JURBIB OVZEER 910 W-15

Himpunan peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan koperasi. - [Jakarta] : Republik Indonesia, [2004]. - JURBIB OVZEER 910 W-15

Kumpulan peraturan perundang-undangan kelembangan koperasi . – Jakarta: Dedy Duta, 2005 – JURBIB OVZEER 910 W-15

4 (empat) Undang-undang R.I. nomor 28, 30, 37 & 41 tahun 2004 tentang Yayasan, Jabatan notaries, Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang , Wakaf / pimpinan: Karnadi – Jakarta : Cipta Jaya, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-15

Pedoman peraturan perkoperasian di bidang organisasi dan badan hukum koperasi. – Buku 1. - Tahun : Kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-15

Pedoman peraturan perkoperasian di bidang organisasi dan badan hukum koperasi. – Buku 2. - Tahun : Kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-15

Peraturan pelaksanaan perkoperasian di Indonesia / dihimpun oleh Hadi Setia Tunggal. - [Jakarta] : Harvarindo, 2006. – JURBIB OVZEER 910 W-15

Himpunan Undang-Undang tentang perlindungan konsumen dan peraturan perundang-undangan yang terkait. – Bandung : Nuansa Aulia, 2006. - JURBIB OVZEER 910 W-15

W 17 Law of obligations; Law of property; Weeskamer; Bankruptcy

Undang-Undang R.I. nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang / [pimpinan: Karnadi]. - Jakarta : Cipta Jaya, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-17

W 18 Adoption

Undang-Undang RI no. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak / [ed.: Yudha Pandu]; [dihimpun oleh] Indonesia Legal Center Publishing. - Jakarta : Indonesia Legal Center Pub. , 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-18

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. - Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-18

W 19 Copyright; Intellectual property rights

Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 Hak Cipta, disahkan Presiden Megawati : Undang Undang nomor 18 tahun 2002 Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Litbang Iptek)/ [dihimpun oleh] Eggi Sudjana]. - Jakarta : Durat Bahagia, 2002. – JURBIB OVZEER 910 W-19

Undang-Undang Haki : hak atas kekayaan intelektual. – Jakarta : Sinar Grafika, 2003. - JURBIB OVZEER 910 W-19

Kitab Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) / dihimpun oleh C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil. - Jakarta : Pradnya Paramita, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-19

Undang-Undang perlindungan Haki (Hak atas Kekayaan Intelektual) / [ed.: Yudha Pandu] ; [dihimpun oleh] Indonesia Legal Center Publishing. - Jakarta : Indonesia Legal Center Pub., 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-19

Himpunan peraturan perundang-undangan di bidang hak-hak atas kekayaan intelektual (HAKI), perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, paten, merek, hak cipta, waralaba, serta pelaksanaan ketentuan dan tata cara pendaftaran usaha waralaba / Abdul Manaf. - Cet. 1. - Bandung : Mandar Maju, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-19

Peraturan pelaksanaan undang-undang merek tahun 2005 / pimpinan: Karnadi – Jakarta : Cipta Jaya, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-19

7 Undang-undang: paten; merek; perindustrian; desain industri; desain tata letak sirkuit terpadu; rahasia dagang; perdagangan barang-barang dalam pengawasan. – Jakarta : Eko Jaya, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-19

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta / disusun oleh: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia , Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. - [S.I.] : Direktorat tsb, 2006. – JURBIB OVZEER 910 W-19

W 20 Commercial law (included: law of the sea, shipping, banking, industry,tourism)

Deregulasi kebijaksanaan pemerintah 7 Juli 1997 bidang perindustrian dan perdagangan : meliputi: ekspor & impor - perpajakan - penanaman modal dan moneter / [red.: Evy Dharmawaty ... [et al.]]. - Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 1997. - JURBIB OVZEER 910 W-20

Kumpulan ketentuan perbankan mengenai prinsip kehati-hatian tahun 1998.
- [Jakarta] : BI, 1998. – JURBIB OVZEER 910 W-20

Pokok-pokok peraturan di bidang perdagangan internasional. – [S.I.] :
Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional Departemen Perindustrian dan
Perdagangan, 1998. – JURBIB OVZEER 910 W-20

Himpunan produk hukum Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan
Menengah - Buku 1. - [Jakarta] : Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan
Menengah, Republik Indonesia, 1999. – JURBIB OVZEER 910 W-20

Himpunan peraturan pendaftaran perusahaan. – [S.I.] : Direktorat Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri [etc.], 1999. - JURBIB OVZEER 910 W-20

Peraturan pemerintah RI nomor 18 tahun 2000 tentang perubahan ketiga
atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1999 tentang badan penyehatan
perbankan nasional dan nomor 17 tahun 2000 tentang permohonan
pernyataan pailit untuk kepentingan umum / Pimpinan H. Nursyahid. –
Jakarta : Panca Usaha, 2000. – JURBIB OVZEER 910 W-20

Himpunan peraturan pelaksanaan undang-undang perdagangan berjangka
komoditi. – Jakarta : Sinar Grafika, 2002. – JURBIB OVZEER 910 W-20

Kitab undang-undang hukum perusahaan. – Jilid 2. dihimpun oleh: C.S.T.
Kansil, Christine S.T. Kansil. - Jakarta : Pradnya Paramita, 2002. – JURBIB
OVZEER 910 W-20-II

Kitab undang-undang hukum perusahaan – Jilid III / dihimpun oleh: C.S.T.
Kansil, Christine S.T. Kansil. - Jakarta : Pradnya Paramita, 2002. – JURBIB
OVZEER 910 W-20-III

Kumpulan peraturan tatalaksana kepabeanan di bidang ekspor. - Jakarta :
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-20

Informasi perwakilan perusahaan perdagangan asing (P3A) / Departemen
Perindustrian Perdagangan. – Tahun Anggaran : Direktorat Bina Usaha dan
Pendaftaran Perusahaan [etc.], 2003. - JURBIB OVZEER 910 W-20

Informasi tentang waralaba / Departemen Perindustrian Perdagangan. –
Tahun Anggaran : Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan [etc.],
2003. - JURBIB OVZEER 910 W-20

Pengembangan usaha KSP/USP koperasi dan sertifikasi tanah / Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. - Jakarta : Kementerian tsb., 2003.
– JURBIB OVZEER 910 W-20

Pengembangan usaha sentra UKM, BDS, dan MAP / Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. - Jakarta : Kementerian tsb., 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-20

Peraturan perundang-undangan perbankan di Indonesia. – Buku 7 / dihimpun oleh Iman Sjahputra Tunggal, Arif Djohan Tunggal, Amin Widjaja Tunggal. - Jakarta : Harvarindo, 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-20

Kitab Undang-undang keuangan negara R.I. perbankan dan korupsi / [disusun oleh: Tasman]. - Cet. ke-3. - Jakarta : Reba Jamboe, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-20

Peraturan perundang-undangan perbankan di Indonesia, Buku 9 / Iman Sjahputra Tunggal. - Jakarta : Harvarindo, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-20

Kompilasi surat keputusan menteri negara urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah, dalam bidang pengesahan akta pendirian, penggabungan dan pemburanaan koperasi serta pedoman klarifikasi koperasi / [Kantor Menteri Negara urusan Koperais dan Ussaha Kecil dan Menengah R.I.]. - Jakarta : Kantor [etc.], 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-20

Himpunan tindak lanjut tentang peraturan export/import 2004. - Jakarta : [s.n.], 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-20

Undang-undang RI nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. – Jakarta: Eko Jaya, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-20

Peraturan Menteri Keuangan RI nomor: 56/PMK.010/2005; nomor 57/PMK.010/2005 tentang Program penurunan/penghapusan tarif bea masuk dalam rangka normal track asean-china free trade area (AC-FTA). – Jakarta : Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-20

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang tentang badan usaha milik Negara/perseroan terbatas Tahun 2005 / Karnadi. – Jakarta : BP. Cipta Jaya, 2005. - JURBIB OVZEER 910 W-20

Kumpulan undang-undang bidang perbankan. – Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum, 2006. - JURBIB OVZEER 910 W-20

Himpunan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas. - [S.I.] : Direktorat tsb, 2006. - JURBIB OVZEER 910 W-20

Kumpulan undang-undang bidang perbankan. – Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum, 2006. - JURBIB OVZEER 910 W-20

Seri peraturan perundang-undangan perbankan Indonesia tahun 1950-2006 / [penyusun: tim redaksi Citra Mandiri]. - Jakarta : Citra Mandiri, 2007. - Jilid 5 – JURBIB OVZEER 910 W-20

Undang-Undang Bank Indonesia UU RI Nomor 3 Tahun 2004 : tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia – [Jakarta] : Asa Mandiri, 2007. - JURBIB OVZEER 910 W-20

Panduan dan informasi peraturan perundang-undangan ekonomi dan perbankan syari'ah Indonesia. – [Jakarta] : Mahkamah Agung RI, [2007]. - JURBIB OVZEER 910 W-20

Seri peraturan perundang-undangan perbankan Indonesia tahun 1950-2004 : memuat: undang-undang perbankan, peraturan pemerintah, keputusan presiden, SK DIR BI, peraturan bank Indonesia, surat edaran bank Indonesia. – Jakarta : CV. Citra Mandiri, 2007. - JURBIB OVZEER 910 W-20

W 21 Investments

Himpunan peraturan penanaman modal. – Jakarta: Pemerintah daerah khusus ibukota Jakarta, 1999. – JURBIB OVZEER 910 W-21

Pasar modal : peraturan pelaksanaan Undang-Undang / dihimpun oleh Iman Sjahputra Tunggal, Arif Djohan Tunggal, Amin Widjaja Tunggal. – Buku II. – [Jakarta] : Harvarindo, 2001. - JURBIB OVZEER 910 W-21

Regulation on investment / Board of Investment East Java Province. - Surabaya : Board of Investment, East Java Province, 2002. – JURBIB OVZEER 910 W-21

Petunjuk pelaksanaan peraturan pasar modal / [dihimpun oleh: Redaksi Sinar Grafika]. – [Jakarta] : Sinar Grafika, 2003. - JURBIB OVZEER 910 W-21

Ketentuan dan prosedur penanaman modal di bidang perdagangan. – Tahun Anggaran : Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan [etc.], 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-21

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 57/SK/2004 tentang pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. - [Jakarta?] : Pancar Utama, [2004]. – JURBIB OVZEER 910 W-21

Seri peraturan perundang-undangan perbankan Indonesia tahun ... Jilid 3: Tahun 1950-2004 / [penyusun: tim redaksi Citra Mandiri]. - Jakarta : Citra Mandiri, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-21

Peraturan pelaksanaan UU pasar modal/ dihimpun oleh: I.S. Tunggal [et al].
– Jakarta : Harvarindo, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-21

Keputusan kepala badan koordinasi penanaman modal Nomor: 70/SK/2004 tentang perubahan atas keputusan kepala badan koordinasi penanaman modal Nomor 57/SK/2004 tentang pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing = The decree of the head of investment coordinating board – Jakarta : BP. Cipta Jaya, edisi 2005. - JURBIB OVZEER 910 W-21

Peraturan pelaksanaan Undang-undang Pasar Modal 2004 / dihimpun oleh Hadi Setia Tunggal. - [Jakarta] : Harvarindo, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-21

Investment regulation for business fields closed and open to investment under certain conditions / Investment Coordinating Board. - [Jakarta] : the Board, [2005]. – JURBIB OVZEER 910 W-21

Investment regulation on foreign direct investment / Investment Coordinating Board. - [Jakarta] : the Board, [2005]. – JURBIB OVZEER 910 W-21

Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang paket kebijakan perbaikan iklim investasi beserta 8 (delapan) peraturan menteri perdagangan tahun 2006 tentang penyempurnaan dan penyederhanaan perizinan / Eko Jaya. - [Jakarta : Eko Jaya], 2006. – JURBIB OVZEER 910 W-21

Himpunan tindak lanjut tentang peraturan ekspor/impor: Keputusan menteri perdagangan RI; Keputusan menteri keuangan RI . - [S.l. : s.n.], 2006. – JURBIB OVZEER 910 W-21

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. – Jakarta : CV. Eko Jaya, 2007. - JURBIB OVZEER 910 W-21

W 23 Transports (of goods)

Keputusan menteri dalam negeri Nomor 1 Tahun 2000 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor Tahun 2000. – Tahun : Direktorat Pembinaan Pendapatan Daerah [etc.], 2000. – JURBIB OVZEER 910 W-23

UU RI nomor 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan. – Jakarta: Panca Ushaha, 2002. – JURBIB OVZEER 910 W-23

UU panas bumi: UU RI nomor 27 tahun 2003 / dihimpung oleh: Hadi Setia Tunggal. – Jakarta : Harvarindo, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-23

W 25 Labour law

Himpunan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan : dilengkapi dengan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. no. KEP-120/MEN/1998 tentang peningkatan upah minimum regional pada 27 (dua puluh tujuh) propinsi di Indonesia = Collection of labor laws : completed with, the decree of the Minister for Manpower of the R.I. no. KEP-120/MEN/1998 re the increase regional minimum wages for 27 (twenty-seven) provinces in Indonesia. - [Jakarta] : Bina Karya BP, 1998. – JURBIB OVZEER 910 W-25

Konvensi umum ILO tentang non-hak azasi manusia (No. 19, 27, 45, 106, 120, 144, 69) : Indonesia – Inggris. - [Jakarta : Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Departemen Tenaga Kerja], 1999 [2000]. – JURBIB OVZEER 910 W-25

Konvensi ILO yang diratifikasi Indonesia / Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. - [Jakarta] : Biro tsb., 1999. – JURBIB OVZEER 910 W-25

Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2000 tentang Konvensi ILO nomor 182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk perkerjaan terburuk untuk anak / dihimpun oleh: Hadi Setia Tunggal. - Jakarta : Harvarindo, 2000. – JURBIB OVZEER 910 W-25

UU RI nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh. – Jakarta: Panca Usaha, 2000. – JURBIB OVZEER 910 W-25

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan (Association of Labour Legislation) : suplemen - Edisi Indonesia Inggris / dihimpun oleh Hadi Setia Tunggal. - [Jakarta] : Yayasan Kesejahteraan Keluarga & Pekerja Indonesia, 2000. – JURBIB OVZEER 910 W-25

Peraturan pemerintah R.I. nomor 83 Tahun 2000 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan social tenaga kerja sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 79 Tahun 1998 / Karnadi. – Jakarta : BP. Cipta Jaya, [2000]. - JURBIB OVZEER 910 W-25

Himpunan peraturan perundangan kesehatan kerja / Zulmiar Yanri. - Cet. ke-2. - [S.I.] : Sekretariat Asean-Oshnet, 2002. – JURBIB OVZEER 910 W-25

Kumpulan peraturan tenaga kerja dibidang kesepakatan, pemutusan, perlindungan, perselisihan industrial, perjanjian kerja, jaminan social dan upah kerja. – Jakarta : CV. Myda, [2002]. - JURBIB OVZEER 910 W-25

Penetapan UMP-UMK-UMS di seluruh Indonesia : berlaku Januari 2002. – [S.I. : s.n.], 2002. – JURBIB OVZEER 910 W-25

Himpunan peraturan perundang-undangan perwakafan tanah milik / Bagian Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. - Jakarta : Bagian tsb., [2002]. – JURBIB OVZEER 910 W-25

Himpunan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan RI : pedoman bagi para manager personalia. - Edisi Indonesia-Inggris. - [Jakarta : Pancabhakti], 2002. - JURBIB OVZEER 910 W-25

Compilation of manpower regulation : law of the republic Indonesia number 13 year 2003 concerning manpower = Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan / dihimpun oleh: Hidayati Agam. – Jakarta : CV. Langgeng Jaya Abadi, 2003. - JURBIB OVZEER 910 W-25

Himpunan konvensi ILO umum dan mengenai hak-hak dasar dalam pekerja : konvensi ILO yang diratifikasi (Indonesia-Inggris). - Jakarta : Myda. 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-25

Undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan & 8 konvensi dasar ILO / diterbitkan oleh: Tim Reformasi Hukum Perburuhan. – [S.I.] : Bumi Intitam Sejahtera, [2003]. – JURBIB OVZEER 910 W-25

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. - Ed. Indonesia-Inggris. - [Jakarta? : Putra Timur Mandiri], [2004]. – JURBIB OVZEER 910 W-25

UU RI nomor 21 tahun 2003 tentang pengesahan konvensi ILO nomor 81 mengenai pengawas ketenagakerjaan dalam industri dan perdagangan = ILO convention nomor 81 concerning Labour Inspection in Industry and Commerce / dihimpun oleh: Hadi Setia Tunggal. – Jakarta : Harvarindo, [2004]. – JURBIB OVZEER 910 W-25

UU penyelesaian perselisihan hubungan industrial : uu RI nomor 2 tahun 2004 / dihimpun oleh: Hadi Setia Tunggal. – Jakarta : Harvarindo, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-25

Undang undang RI nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial – edisi Indonesia-Inggris / Ed.: Amd Guningsih- [S.I.] Timur Putra Mandiri, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-25

Himpunan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan bidang hubungan industrial, syarat-syarat kerja, PTKA dan perlindungan tenaga kerja. - Jakarta : Restu Pandutama, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-25

Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang ketenagakerjaan tahun 2004. - Jakarta : Bhina Karya, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-25

Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang ketenagakerjaan tahun 2004 (Indonesische of Engelse tekst). - Jakarta : Bhina Karya, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-25

Undang-undang ketenagakerjaan Indonesia : Undang-undang no. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-undang no. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang no. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial = Major labour laws of Indonesia : Act no. 21 of 2000 on Trade Unions, Act no. 13 of 2003 on Manpower, Act no. 2 of 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement. - [Jakarta : Kantor Perburuhan Internasional], 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-25

Kebijakan peraturan ketenagakerjaan 2004. - Jakarta : Medya Duta, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-25

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri : dilengkapi: Pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPR-RI dan sambutan pemerintah. - [Jakarta] : Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-25

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial / pimpinan: H. Nursyahid – Jakarta : Panca Usaha, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-25

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 : tentang Ketenagakerjaan. – Tahun : INGGRIS, 2004. - JURBIB OVZEER 910 W-25

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. – Edisi Indonesia-INGGRIS. – CV. Timur Putra Mandiri, [2004]. – JURBIB OVZEER 910 W-25

Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. - [Bandung] : Fokusmedia, [2005]. – JURBIB OVZEER 910 W-25

Enam Undang-undang- Jakarta: Eko Jaya, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-25

Peraturan perundang-undangan RI bidang ketenagakerjaan = government regulation of RI concerning manpower. – Jakarta : Bhina Karya, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-25

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan: suplemen / dihimpun oleh Hadi Setia Tungga. - [Jakarta] : Harvarindo, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-25

Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia : Nomor: per. 09/men/v/2005 tentang tata cara penyampaian laporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, Nomor: per.10/men/v/2005 tentang pengangkatan dan pemberhentian konsiliator serta tata kerja konsiliasi / Menteri tenaga kerja transmigrasi Republik Indonesia. – Pusat Humas : Departemen tenaga kerja dan transmigrasi R.I., 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-25 (Bijl.: Keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia.)

Himpunan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan RI : bidang hubungan industrial, syarat-syarat kerja, PTKA dan perlindungan tenaga kerja. – Jakarta : Bhina Karya, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-25

Peraturan pelaksanaan Undang-undang Ketenagakerjaan tahun 2005 / dihimpun oleh Hadi Setia Tunggal. - [Jakarta] : Harvarindo, 2006. – JURBIB OVZEER 910 W-25

Putusan mahkamah agung konstitusi tentang jaminan sosial tenaga kerja : disertai peraturan pelaksanaan / [ed.: Taufik Tardianto]. - [Jakarta : Panca Bhakti], 2006. - JURBIB OVZEER 910 W-25

Perubahan atas peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja / Karnadi. – Jakarta : BP. Cipta Jaya, 2006. – JURBIB OVZEER 910 W-25

Suplemen peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan RI. – Jakarta : BP. Media Info, 2006. - JURBIB OVZEER 910 W-25

W 26 Agrarian law

Pilihan peraturan perumahan dan pertanahan pajak bumi bangunan 1997. – Jakarta : CV. Myda, 1997. – JURBIB OVZEER 910 W-26

Himpunan tindak lanjut peraturan pertanahan/perumahan tahun 2000 / pimpinan: Karnadi. – Jakarta : Cipta Jaya,. 2000. – JURBIB OVZEER 910 W-26

Tindak lanjut : pedoman tata cara hak atas tanah Tahun 2002. – Suplemen. - Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2002. - JURBIB OVZEER 910 W-26

Keputusan : presiden Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2003 tentang kebijakan nasional di bidang pertanahan. – Jakarta : CV. Myda, [2003]. - JURBIB OVZEER 910 W-26

Himpunan peraturan di bidang pertanahan dan perumahan tahun - Jakarta : Cipta Jaya, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-26

Himpunan peraturan perundang-undangan pertanahan tahun 2001-2004. - Jakarta : Medya Duta, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-26

Peraturan penunjang pejabat pembuat akta tanah dan hak tanggungan atas tanah / [pimpinan: Karnadi]. - Jakarta : Cipta Jaya, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-26

Peraturan perundang-undangan bidang hak-hak atas tanah. - [Jakarta] : Badan Pertanahan Nasional, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-26

Pilihan peraturan di bidang pertanahan. Jakarta : Eko Jaya, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-26

Peraturan presiden R.I. nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum / pimpinan: Karnadi – Jakarta : Cipta Jaya, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-26

Himpunan peraturan perundang-undangan pertanahan dan petunjuk PPAT di Indonesia. – Jilid 3: tahun 2004-2005 / Tim Redaksi CV. Citra Mandiri. - Jakarta : Citra Mandiri, 2006. – JURBIB OVZEER 910 W-26

Peraturan perundang-undangan pertanahan / dihimpun oleh Hadi Setia Tunggal. - [Jakarta] : Harvarindo, 2006. – JURBIB OVZEER 910 W-26

Peraturan perundang-undangan pertanahan / dihimpun oleh Hadi Setia Tunggal. - [Jakarta] : Harvarindo, 2006. – JURBIB OVZEER 910 W-26

Peraturan perundang-undangan tenaga kerja RI bidang pengawasan ketenagakerjaan dalam penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak, pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK). – [S.I.] : Bhina Karya, 2006. – JURBIB OVZEER 910 W-26

Himpunan peraturan di bidang pertanahan dan perumahan Tahun 2004/2005 / Karnadi. – Jakarta : BP. Cipta Jaya, 2006. – JURBIB OVZEER 910 W-26

Peraturan presiden R.I. Nomor 65 Tahun 2006 : tentang perubahan atas peraturan presiden no. 36 th. 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum / Karnadi. – Jakarta : BP. Cipta Jaya, 2006. - JURBIB OVZEER 910 W-26

Himpunan peraturan pertanahan Tahun 2007 : PP.NO. 36-65 Tentang Tanah Bagi Kepentingan Umum. – Jakarta : CV. Tamita Utama, 2007. – JURBIB OVZEER 910 W-26

Pokok-pokok hukum agrarian. – Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2007. – (Seri Perundangan). - JURBIB OVZEER 910 W-26

W 28 Education

Petunjuk pelaksanaan sistem pendidikan nasional, 2003. - Jakarta : Eko Jaya, 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-28

Petunjuk pelaksanaan sistem pendidikan nasional, 2004. - Jakarta : Cipta Jaya, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-28

Undang-Undang Tentang Sisdiknas dan peraturan pelaksanaannya, 2000-2004 : pedoman pendirian sekolah dari SD sampai universitas. - Jakarta : Tamita Utama, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-28

Himpunan peraturan tentang pendidikan tinggi di Indonesia: dilengkapi pedoman umum akreditasi nasional perguruan tinggi 2004. – [Jakarta] : Bina Dhamram Pemuda, 2004. - JURBIB OVZEER 910 W-28

Himpunan peraturan sistem pendidikan nasional 2004 / diterbitkan oleh: Eko Jaya. - Jakarta : Eko Jaya, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-28

Peraturan pemerintah R.I. nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan / pimpinan: Karnadi – Jakarta : Cipta Jaya, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-28

Undang-undang guru dan dosen. - [Yogyakarta] : Pustaka Pelajar, [2006]. – JURBIB OVZEER 910 W-28

Petunjuk pelaksanaan sistem pendidikan nasional Tahun 2005/2006 dan angka kredit jabatan fungsional guru/jabatan dosen / Karnadi. – Jakarta : BP. Cipta Jaya, 2006. – JURBIB OVZEER 910 W-28

Undang-Undang R.I. No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen / Karnadi. – Jakarta : BP. Cipta Jaya, 2006. – JURBIB OVZEER 910 W-28

Undang-Undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen serta standar nasional pendidikan Tahun 2005. – Jakarta : CV. Tamita Utama, 2006. - JURBIB OVZEER 910 W-28

W 29 Mahkamah Agung

Himpunan peraturan perundang-undangan departemen agama tahun 1998. – [Jakarta] : Departemen Agama RI, Sekretariat Jenderal, [1999]. – JURBIB OVZEER 910 W-29

Perundang-undangan tentang penyelenggaraan haji / Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama. - Jakarta : Direktorat tsb., 2002. – JURBIB OVZEER 910 W-29

Himpunan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan pengadilan tinggi agama / pengadilan agama se-Indonesia / Departemen Agama , Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. - [Jakarta] : Direktorat tsb., 2002. – JURBIB OVZEER 910 W-29

Himpunan peraturan perundang-undangan produk departemen Agama Tahun 2004 / Departemen Agama R.I. : Sekretariat Jenderal, [2005]. – JURBIB OVZEER 910 W-29

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan keputusan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri tahun 2006. - [Yogyakarta : Citra Utama], 2006. – JURBIB OVZEER 910 W-29

Peraturan perundangan perwakafan. – Departemen Agama : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006. - JURBIB OVZEER 910 W-29

Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf & peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. – Departemen Agama : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007. - JURBIB OVZEER 910 W-29

W 31 Military law

Departemen Pertahanan keamanan RI Buku UU pertanahan keamanan Negara R.I. – Jakarta: Sekretariat Jenderal Dephankam, 1991. – JURBIB OVZEER 910 W-31

Undang-undang bidang pertahanan keamanan (Hankam) 1997 / [Pemerintah Indonesia ; red. Anggreani Sari ... et al.]. - Cet. 1. - Jakarta : Mitra Info, 1997. – JURBIB OVZEER 910 W-31

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas-tugas TNI- Jilid I / Sekretariat Umum, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI). - Jakarta : Sekretariat Umum Mabes TNI, 2000- JURBIB OVZEER 910 W-31-I

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas-tugas TNI- Jilid II / Sekretariat Umum, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI). - Jakarta : Sekretariat Umum Mabes TNI, 2000. - JURBIB OVZEER 910 W-31-II

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dilengkapi: Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tentang Pertahanan Nasional. - Jakarta : Eko Jaya, 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-31

Himpunan peraturan perundang-undangan bagi prajurit TNI / Badan Pembinaan Hukum, Markas Besar, Tentara Nasional Indonesia (Babinkum TNI). - [Jakarta] : Badan tsb., 2004. – JURBIB OVZEER 910 W-31

W 32 Telecommunication law & E-law

Ikhtisar peraturan perundang-undangan di bidang parpostel dan peraturan-peraturan yang terkait. - [Jakarta : Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi], 1995. – JURBIB OVZEER 910 W-32

UU penyiaran beserta peraturan pelaksanaannya tahun 2005. - Jakarta : Eko Jaya, 2005 – JURBIB OVZEER 910 W-32

Himpunan peraturan perundang-undangan telematika / Edmon Makarim, Jakarta : RajaGrafindo, 2005. – JURBIB OVZEER 910 W-32

Peraturan pemerintah Republik Indonesia tentang lembaga penyiaran asing, swasta, komunitas, berlangganan, radio dan televisi / Sumaryo Budi R.. – Jakarta : CV. Citra Utama, 2006. – JURBIB OVZEER 910 W-32

W 33 Human rights

Peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan kesejahteraan anak. - Jakarta : Panca Usaha, 2002. – JURBIB OVZEER 910 W-33

Informasi peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. - [Jakarta] : Direktorat Hukum dan Peradilan . Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI-Hukum), 2003. – JURBIB OVZEER 910 W-33

Mengenal lebih dekat : UU no. 23/2002 tentang perlindungan anak. – Jakarta : Komisi Nasional Perlindungan Anak [etc.], 2004. - JURBIB OVZEER 910 W-33

Yurisprudence

J 00 Jurisprudence in general

Beberapa putusan berkekuatan hukum tetap pada pengadilan di wilayah hukum Surabaya. – [Jakarta] : Mahkamah Agung RI, 1998. – JURBIB OVZEER 910 J-00

Beberapa putusan berkekuatan hukum tetap pada pengadilan di wilayah hukum Surabaya. – [Jakarta] : Mahkamah Agung RI, 1998. – JURBIB OVZEER 910 J-00

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2003. - [Jakarta] : Mahkamah Agung RI, 2004. – JURBIB OVZEER 910 J-00

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2004. - [Jakarta] :
Mahkamah Agung RI, 2005. - JURBIB OVZEER 910 J-00

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2005. - [Jakarta] :
Mahkamah Agung RI, 2006. - JURBIB OVZEER 910 J-00

J 01 Constitutions, Basic rights, Human rights

Himpunan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 1A
(Nomor: 001-006) / [dihimpun oleh: Tim Redaksi Tatanusa]. - Jakarta :
Tatanusa, 2005. – JURBIB OVZEER 910 J-01

Himpunan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 1B
(Nomor: 007-024) / [dihimpun oleh: Tim Redaksi Tatanusa]. - Jakarta :
Tatanusa, 2005. – JURBIB OVZEER 910 J-01

Himpunan putusan-putusan Mahkamah Agung dalam perkara hak asasi
manusia – Jilid 1 / disusun oleh: Eddy Djunadedi Karnasudirdja. - Jakarta :
Tatanusa, 2006- JURBIB OVZEER 910 J-01

J 05 The judiciary; Arbitration; Legal profession, legal aid

Himpunan peraturan, ketetapan, dan putusan MK 2003-2004. – Buku III,
Jilid 1,2,3,4. - [Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia], 2004. –
JURBIB OVZEER 910 J-05

Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. tentang pengujian Undang-Undang
Jabatan Notaris & Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang. - Jakarta : Cipta Jaya, [2005/2006 [i.e. 2005]]. – JURBIB
OVZEER J-05

J 12 Criminal law; Subversion

Himpunan putusan pengadilan negeri dan putusan pengadilan tinggi :
perkara pidana 2006. – Jakarta : Mahkamah Agung RI [etc.], 2006. - JURBIB
OVZEER 910 J-12

Himpunan putusan pengadilan negeri dan putusan pengadilan tinggi :
perkara pidana 2006. – Jakarta : Mahkamah Agung RI [etc.], 2006. - JURBIB
OVZEER 910 J-12

J 14 Tax law

Resume putusan pengadilan pajak (seri II). – [S.I.] : Sekretariat Pengadilan
Pajak, [2005]. – JURBIB OVZEER 910 J-14

J 15 Private law; international private law

Tiga putusan yurisprudensi yang penting / Z. Asikin Kusumah Atmadja. – Mahkamah Agung, Untuk Kalangan Sendiri [?], 1992. – JURBIB OVZEER 910 J-15

SDR. Ketua dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia : sehubungan dengan surat Saudara tertanggal 23 Juli 2001 Nomor ... / Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. – [S.l. : s.n.], 2001. - JURBIB OVZEER 910 J-15

Himpunan kaidah hukum putusan perkara dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1969-2004 / dihimpun oleh Mahkamah Agung RI. - [Jakarta] : Mahkamah Agung RI, 2005. - JURBIB OVZEER J-15

J 17 Law of obligations; Law of property; Weeskamer; Bankruptcy

Himpunan putusan-putusan Pengadilan Niaga : perkara niaga 2002 - Jakarta : Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I., Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, 2002. – JURBIB OVZEER 910 J-17

Himpunan putusan-putusan Mahkamah Agung dalam perkara kepailitan. – Jilid 11 / dihimpun oleh: Tim Redaksi Tatanusa. - Jakarta : Tatanusa, 2004. - JURBIB OVZEER 910 J-17

Himpunan putusan-putusan Mahkamah Agung dalam perkara kepailitan . - Jilid 12 / ihimpun oleh: Tim Redaksi Tatanusa. - Jakarta : Tatanusa, 2004. JURBIB OVZEER 910 J-17

Himpunan putusan-putusan Mahkamah Agung dalam perkara kepailitan. – Jilid 13 / dihimpun oleh: Tim Redaksi Tatanusa. - Jakarta : Tatanusa, 2004. - 910 J-17

Himpunan putusan-putusan Mahkamah Agung dalam perkara kepailitan. – Jilid 14 / dihimpun oleh: Tim Redaksi Tatanusa. - Jakarta : Tatanusa, 2004. - JURBIB OVZEER 910 J-17

Himpunan putusan-putusan Mahkamah Agung dalam perkara kepailitan. – Jilid 15 / dihimpun oleh: Tim Redaksi Tatanusa. - Jakarta : Tatanusa, 2004. - JURBIB OVZEER 910 J-17

Himpunan putusan-putusan Mahkamah Agung dalam perkara kepailitan. – Jilid 16 / dihimpun oleh: Tim Redaksi Tatanusa. - Jakarta : Tatanusa, 2004. – JURBIB OVZEER 910 J-17

Himpunan putusan-putusan Mahkamah Agung dalam perkara kepailitan. – Jilid 17 / dihimpun oleh: Tim Redaksi Tatanusa. - Jakarta : Tatanusa, 2004. – JURBIB OVZEER 910 J-17

Himpunan putusan-putusan Mahkamah Agung dalam perkara kepailitan. – Jilid 18 / dihimpun oleh: Tim Redaksi Tatanusa. - Jakarta : Tatanusa, 2005. – JURBIB OVZEER 910 J-17

Himpunan putusan-putusan Mahkamah Agung dalam perkara kepailitan- Jilid 19 / dihimpun oleh: Tim Redaksi Tatanusa. - Jakarta : Tatanusa, 2005. – JURBIB OVZEER 910 J-17

Himpunan putusan-putusan Mahkamah Agung dalam perkara kepailitan- Jilid 20 / dihimpun oleh: Tim Redaksi Tatanusa. - Jakarta : Tatanusa, 2007. – JURBIB OVZEER 910 J-17

Himpunan putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan . – Jilid 11. / dihimpun oleh: Tim Redaksi Tatanusa. - Jakarta : Tatanusa, 2004. – JURBIB OVZEER 910 J-17

Himpunan putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan . – Jilid 12. / dihimpun oleh: Tim Redaksi Tatanusa. - Jakarta : Tatanusa, 2004. - JURBIB OVZEER 910 J-17

Himpunan putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan . – Jilid 13 / dihimpun oleh: Tim Redaksi Tatanusa. - Jakarta : Tatanusa, 2004. – JURBIB OVZEER 910 J-17

Himpunan putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan . – Jilid 14 / dihimpun oleh: Tim Redaksi Tatanusa. - Jakarta : Tatanusa, 2004. – JURBIB OVZEER 910 J-17

Himpunan putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan . – Jilid 15 / dihimpun oleh: Tim Redaksi Tatanusa. - Jakarta : Tatanusa, 2004. - JURBIB OVZEER 910 J -17

Himpunan putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan. Jilid 16 / dihimpun oleh: Tim Redaksi. - Tatanusa. - Jakarta : Tatanusa, 2004. – JURBIB OVZEER 910 J-17

Himpunan putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan. Jilid 17 / dihimpun oleh: Tim Redaksi. - Tatanusa. - Jakarta : Tatanusa, 2004. – JURBIB OVZEER 910 J-17

Himpunan putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan. Jilid 18 / dihimpun oleh: Tim Redaksi. - Tatanusa. - Jakarta : Tatanusa, 2005. – JURBIB OVZEER 910 J-17

Himpunan putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan. Jilid 19 / dihimpun oleh: Tim Redaksi. - Tatanusa. - Jakarta : Tatanusa, 2005. – JURBIB OVZEER 910 J-17

Himpunan putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan – Jilid 20: Juli s/d Oktober 2005 / dihimpun oleh: Tim Redaksi Tatanusa. - Jakarta : Tatanusa, 2006. – JURBIB OVZEER 910 J-17

Himpunan putusan-putusan Pengadilan Niaga : perkara niaga 2001. - Jakarta : Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I., Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, 2001. – JURBIB OVZEER 910 J-17

Himpunan putusan-putusan Pengadilan Niaga : perkara niaga 2003. - Jakarta : Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I., Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, 2003. – JURBIB OVZEER 910 J-17

Himpunan putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam perkara merek- Jilid 5 / dihimpun oleh Tim Redaksi Tatanusa. - Jakarta, Indonesia : Tatanusa, 2005. – JURBIB OVZEER 910 J-17

Himpunan putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam perkara merek –Jilid 6 / dihimpun oleh Tim Redaksi Tatanusa. - Jakarta, Indonesia : Tatanusa, 2005. – JURBIB OVZEER 910 J-17

Himpunan putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam perkara merek – Jilid 7/ dihimpun oleh Tim Redaksi Tatanusa. - Jakarta, Indonesia : Tatanusa, 2006 – JURBIB OVZEER 910 J-17

Himpunan yurisprudensi hukum kepailitan, hutang piutang, waris / [dihimpun oleh] S. Suryono. - Ed. 2005. - Jakarta : Cipta Jaya, 2005. – JURBIB OVZEER 910 J-17

J 19 Copyright; Intellectual property rights

Himpunan putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam perkara merek- Jilid 2 / dihimpun oleh Tim Redaksi Tatanusa. - Jakarta, Indonesia : Tatanusa, 2002 – JURBIB OVZEER 910 J-19

Himpunan putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam perkara merek, Jilid 3 / dihimpun oleh Tim Redaksi Tatanusa. - Jakarta, Indonesia : Tatanusa, 2004- JURBIB OVZEER 910 J-19

Himpunan putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam perkara hak cipta, Jilid 1 / dihimpun oleh Tim Redaksi Tatanusa. - Jakarta : Tatanusa, 2005. – JURBIB OVZEER 910 J-19

Himpunan putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam perkara desain industri / dihimpun oleh Tim Redaksi Tatanusa. - Jakarta : Tatanusa, 2005. – JURBIB OVZEER 910 J-19

Himpunan yurisprudensi hukum hak cipta & merk : dilengkapi putusan Mahkamah Konstitusi pengujian undang-undang tentang Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Mahkamah Agung / [dihimpun oleh] S. Suryono. - d. 2005. - Jakarta : Cipta Jaya, 2005. – JURBIB OVZEER 910 J-19

Himpunan putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam perkara merek- Jilid 8 / dihimpun oleh Tim Redaksi Tatanusa. - Jakarta, Indonesia : Tatanusa, 2006 – JURBIB OVZEER 910 J-19

Himpunan putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam perkara merek- Jilid 9 / dihimpun oleh Tim Redaksi Tatanusa. - Jakarta, Indonesia : Tatanusa, 2006 – JURBIB OVZEER 910 J-19

J 25 Labour law

Himpunan putusan kasasi peradilan agama [2002] / [penerb.] Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama. - [Jakarta] : Direktorat tsb., 2002. – JURBIB OVZEER 910 J-25

Himpunan putusan kasasi peradilan agama [2003] / [penerb.] Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama. - [Jakarta] : Direktorat tsb., 2003. – JURBIB OVZEER 910 J-25

Putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. - [Jakarta] : Panca Bhakti, 2005. – JURBIB OVZEER J-25

J 27 Law of civil procedure

Putusan mahkamah agung : hukum acara perdata masa setengah abad : kompilasi kaidah hukum / M. Ali Boediarso. – Penerbit : Swara Justitia, 2005. - JURBIB OVZEER 910 J-27

J 29 Mahkamah Agung

Yurisprudensi peradilan agama tahun 2000 / Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama. - [Jakarta] : Direktorat tsb., 199X-.... – JURBIB OVZEER 910 J-29

Penerapan hukum acara penyelesaian perkara perwakafan / [tim penyusun: (ketua): Siti Zubaedah ; (wakil ketua): H.A. Baidhowi ; (anggota): Razali M. Yusuf ... et al. ; pengarah: Wahyu Widiana, Hidayatullah]. - Jakarta : Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama, 2002. – JURBIB OVZEER 910 J-29

Himpunan putusan kasasi peradilan agama [2000] / [penerb.] Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama, Departemen Agama. - [Jakarta] : Direktorat tsb., 2000. – JURBIB OVZEER 910 J-29

Penerapan hukum acarea dalam penyelesaian perkara kewarisan pada badan peradilan agama / ed.: Entein Kuraisin. – [Jakarta] : Departemen Agami RI, 2000. – JURBIB OVZEER 910 J-29

Himpunan putusan kasasi peradilan agama [2004] / [penerb.] Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama. - [Jakarta] : Direktorat tsb., 2004. JURBIB OVZEER 910 J-29

P-Jakarta

Himpunan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup pemerintah propinsi DKI Jakarta – Jakarta : Proyek Kodifikasi Hukum Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota, 2000. – JURBIB OVZEER 910 P-Jakarta

Himpunan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2001 / disusun oleh: Biro Hukum Propinsi DKI Jakarta. – [S.I.] - Jaya Raya, 2001. – JURBIB OVZEER 910 P-Jakarta

Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta : tahun 2002 / Jakarta (Daerah Khusus Ibukota). - Jakarta : Daerah tsb., 2002. – JURBIB OVZEER 910 P-JAKARTA

Abstrak Undang-undang, peraturan pemerintahan dan peraturan daerah Propinsi DKI Jakarta tahun 2000. - [Jakarta] : Proyek Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum, 2002. – JURBIB OVZEER 910 P-Jakarta

Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta : tahun 2003 / Jakarta (Daerah Khusus Ibukota). - Jakarta : Daerah tsb., [2003]. – JURBIB OVZEER 910 P-Jakarta

Himpunan peraturan penataan wilayah / Biro Administrasi Wilayah , Propinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. - Jakarta : Biro tsb., [2003]. – JURBIB OVZEER 910 P-Jakarta

Himpunan peraturan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta / [ed.: Mirza Kelana Jaya]. - [Jakarta?]: [Disebarluaskan oleh BP. Arta Putra Piraga], 2005. - JURBIB OVZEER 910 P-Jakarta

Himpunan peraturan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta 2006. - [S.l.] :
Jaya Raya, 2006. – JURBIB OVZEER 910 P-Jakarta

Himpunan peraturan perundang-undangan perizinan bidang sumber daya
alam dan lingkungan hidup pemerintah provinsi dki Jakarta. – Jakarta : Biro
Hukum Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota, 2006. - JURBIB OVZEER
910 P-Jakarta